



Lumbung Langit

Menata Geografi Pangan dalam Tuntunan Al-Qur'an

Dr. Ery Sunandar, M.Si., M.H.

Editor: Dr. Abdullah Safei, M.Ag.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:

Dr. Abdullah Safei, M.Ag.

LUMBUNG LANGIT

Menata Geografi Pangan dalam Tuntunan Al-Qur'an

Dr. Ery Sunandar, M.Si., M.H.

Publica Indonesia Utama
2026

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

x + 388 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7673-09-1

Cetakan Pertama, April 2026

Lambung Langit: Menata Geografi Pangan dalam Tuntunan Al-Qur'an

Penulis : Dr. Ery Sunandar, M.Si., M.H.
Editor : Dr. Abdullah Safei, M.Ag.
Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati
Penata halaman : M. Nur Alfian Halim
Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2026

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR EDITOR

Persoalan ketahanan pangan sering kali terjebak dalam angka-angka statistik produksi dan luas lahan. Kita sering lupa bahwa di balik hamparan sawah dan distribusi logistik, terdapat dimensi manusia, lingkungan, dan nilai spiritual yang saling berkelindan. Buku yang ada di tangan Anda ini, yang diadaptasi dari penelitian doktoral Sdr. Ery Sunandar di Universitas PTIQ Jakarta, hadir untuk mendobrak keterbatasan pandangan teknokratik tersebut.

Penulis menawarkan sebuah paradigma baru yang segar dan berani, *Lambung Langit: Menata Geografi Pangan dalam Tuntunan Al-Qur'an*. Buku ini bukan sekadar kajian pemetaan fisik, melainkan sebuah redefinisi strategi pembangunan berkelanjutan yang memadukan instrumen analitis geografi modern—keruangan, ekologi, dan regional kompleks—dengan nilai-nilai normatif Al-Qur'an sebagai kompas etisnya.

Ada tiga alasan utama mengapa buku ini menjadi referensi wajib bagi akademisi, pengambil kebijakan, maupun pegiat sosial. Pertama, buku ini melakukan kritik tajam terhadap pandangan geografi deterministik. Penulis menegaskan bahwa kerawanan pangan bukanlah semata-mata soal kekurangan stok fisik, melainkan sering kali merupakan “kegagalan hak akses” (*entitlement*) dan ketimpangan kelembagaan. Di sini, penulis sejalan dengan pemikiran tokoh dunia seperti Amartya Sen, namun dengan tambahan kedalaman spiritual yang khas.

Kedua, penulis berhasil mengoperasionalkan ayat-ayat suci ke dalam strategi spasial yang nyata. Prinsip keadilan distribusi dalam QS al-Hasyr diwujudkan untuk mengatasi ketimpangan wilayah; manajemen krisis model Yusufi (QS Yusuf) ditarik menjadi strategi resiliensi; dan jaminan stabilitas sosial dalam QS Quraisy diterjemahkan menjadi kebijakan berbasis wilayah (*place-based policy*).

Ketiga, buku ini menempatkan sumber daya manusia sebagai penggerak utama. Di era digital dan bonus demografi, penulis menekankan bahwa teknologi dan instrumen geografi hanyalah alat; kemaslahatan semesta hanya akan tercapai jika pengelolanya memiliki integritas etis dan pemahaman mendalam tentang daya dukung lingkungan yang telah ditetapkan Sang Pencipta.

Sebagai editor, kami melihat karya ini sebagai jembatan yang menghubungkan antara teks suci yang statis dengan realitas spasial yang dinamis. Melalui desain kualitatif yang kuat dan triangulasi sumber yang komprehensif, buku ini berhasil membangun kerangka konseptual yang utuh: bahwa ketahanan pangan adalah sistem kehidupan yang berlandaskan etika kewilayahan.

Kami berharap buku ini tidak hanya berhenti di rak perpustakaan, tetapi mampu memicu dialog lebih luas dan menjadi pijakan bagi perumusan kebijakan pangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Selamat menyelami pemikiran yang integratif ini.

Jakarta, Maret 2026

Editor

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarganya dan para sahabatnya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengaturnya terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.;
2. Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.;
3. Prof. Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A.;
4. Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.;
5. Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.;
6. Prof. Dr. H. Zainun Kamaluddin Fakhri, M.A.;
7. Dr. Muhammad Suaib Tahir, M.A.;
8. Bapak Andi Jumardi;
9. Ibu Siti Mariam;
10. orang tua atas didikan, asuhan, dan lantunan doa, sehingga penulis sampai pada capaian ini;
11. Rahmi Dwi Yuliafitri istri tercinta, dan putra/putri penulis yang telah menyertai penulis dalam suka dan duka, serta sanak famili yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini; dan
12. Dr. Abdullah Safei, Rizky Farandy, Prisca, dan teman-teman yang menjadi teman diskusi yang intens dan yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian buku ini.

Semoga Allah Swt. membalas seluruh kebaikan semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian buku ini. Akhirnya hanya

kepada Allah juga penulis berharap agar buku ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan bagi penulis khususnya serta anak-anak penulis. Amin.

Jakarta, 05 Januari 2026

Penulis

Ery Sunandar

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
Bab I	
Pendahuluan	1
Bab II	
Tinjauan Teori Pendekatan Geografi.....	15
A. Definisi dan Kerangka Konsep Geografi	15
B. Pendekatan Keruangan	21
C. Pendekatan Ekologi	30
D. Pendekatan Regional Kompleks	47
E. Studi Penelitian yang Menggunakan Pendekatan Geografi	57
Bab III	
Realitas Pembangunan Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan.....	107
A. Ketahanan Pangan	107
B. Pembangunan Berkelanjutan	113
C. Studi Terkait Pembangunan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan.....	143
D. Realitas Pembangunan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan di Indonesia	180
Bab IV	
Isyarat Al-Qur'an tentang Pembangunan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan	229
A. Penelitian Terdahulu Mengenai Isyarat Al-Qur'an tentang Ketahanan Pangan	232
B. Isyarat Al-Qur'an tentang Ketersediaan Pangan.....	247
C. Isyarat Al-Qur'an tentang Akses terhadap Pangan	263
D. Isyarat Al-Qur'an tentang Pemanfaatan Pangan	275
E. Isyarat Al-Qur'an tentang Stabilitas Pangan	286

Bab V**Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dengan Pendekatan Geografi Perspektif Al-Qur`An..... 297**

- A. Instrumen Pendekatan Geografi dalam Pembangunan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan 297
- B. Keselarasan Pendekatan Geografi dengan Isyarat Al-Qur`an terkait Pembangunan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan..... 314
- C. Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan yang Menerapkan Instrumen Geografi dengan Perspektif Al-Qur`an..... 322

Bab VI

- Penutup** 353
- Daftar Pustaka..... 363
- Profil Penulis..... 387

BAB I

PENDAHULUAN

Kemunculan konsep pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan kesadaran tentang tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dengan inti pada kepentingan ekonomi. Konsep ini menekankan pentingnya pembangunan berwawasan jangka panjang yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi untuk menjamin keberlanjutan kehidupan generasi masa kini dan masa depan.¹ Pembangunan berkelanjutan melibatkan berbagai dimensi ruang wilayah, seperti pemberantasan kemiskinan, penciptaan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dinamika kependudukan yang seimbang, peningkatan kesehatan, serta penyediaan perumahan dan permukiman yang layak. Secara global, isu pembangunan berkelanjutan juga mencakup tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, khususnya aspek pangan yang menjadi syarat fundamental bagi keberlangsungan hidup serta stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.²

Menurut Prof. Jeffrey Sachs, seorang pakar pembangunan berkelanjutan bereputasi internasional dan profesor di Columbia University, beberapa komponen utama dalam pembangunan berkelanjutan meliputi upaya mengatasi kemiskinan, perubahan pola konsumsi dan produksi menuju yang berkelanjutan, dinamika demografis serta kesehatan masyarakat, dan pengembangan permukiman yang layak dan inklusif. Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan untuk melihat pembangunan tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari dimensi sosial dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang.³ Konsep pembangunan

1 World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987, hlm. 8.

2 United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1*. New York: United Nations, 2015, hlm. 3.

3 Jeffrey D. Sachs. *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press, 2015, dibahas dalam *The Sustainable Development Goals Report*

berkelanjutan ini diperkuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini hingga masa depan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa pembangunan yang berwawasan jangka panjang merupakan konsep dalam pembangunan berkelanjutan, meliputi jangka waktu antargenerasi, dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup serta lingkungan yang sehat dalam mendukung kehidupan manusia.⁴

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu pemenuhan akan pangan.⁵ Pemenuhan pangan di Indonesia dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Dijelaskan juga dalam ketentuan umum pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.⁶

2025, Bab 1 SDG 1.

4 World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987, hlm. 43.

5 The Right to Adequate Food. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*. Faktaheet PDF, 2005, hlm. 1-2

6 Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

Hal tersebut di atas juga sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan, dengan menyelenggarakan fungsi berikut. Pertama, koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan, dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, serta peningkatan keamanan pangan segar. Kedua, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan. dan peningkatan keamanan pangan segar. Ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar. Keempat, pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan. Kelima, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.⁷

Selanjutnya keterlibatan swasta dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk ketahanan pangan ditunjukkan dalam pelaksanaan “Jakarta Food Security Summit (JFSS) Kelima” pada 18–19 November 2020 oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Berikut beberapa data dan informasi yang didapatkan dalam kegiatan tersebut. Pertama, pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, di antaranya, 1) Kementerian BUMN telah menyiapkan rencana kerja untuk 100 tahun Indonesia merdeka. Rencana kerja tersebut bertujuan untuk mencapai ketahanan energi, ketahanan pangan, dan kesehatan; 2) untuk mencapai ketahanan pangan terpenting adalah keberlanjutan (*sustainability*), bukan hanya terjangkau (*affordability*) harganya, tetapi produksi pangan harus berkelanjutan. Selain itu untuk mencapai ketahanan pangan perlu juga membangun ekosistem usaha yang sehat untuk semua pelaku ekonomi, termasuk petani; dan 3) BUMN juga akan berperan dalam

⁷ Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional*.

mencapai ketahanan pangan melalui pembentukan kluster BUMN pangan. Kluster BUMN ini bertujuan untuk mengembangkan industri pangan nasional, baik untuk pemenuhan pasar domestik, substitusi impor, peningkatan ekspor serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak. Kluster BUMN pangan ini akan menyinergikan dan mengoptimalkan *value chain* dari hulu ke hilir. Kluster pangan ini akan mengelola sejumlah komoditas seperti beras, jagung, gula, ayam, sapi, kambing, ikan, cabai bawah merah, dan garam.⁸

Kedua, pernyataan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro yang mengatakan, pada sektor pertanian, terdapat tiga program inovasi, yaitu 1) inovasi tepat guna untuk mencapai ketahanan pangan; 2) inovasi yang melahirkan *value added* untuk hasil pangan dan pertanian; dan 3) inovasi yang melahirkan substitusi impor dengan produk pangan lokal. Ketiga, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan juga menyatakan peringatan Badan Pangan Dunia (FAO) bahwa dunia bisa mengalami krisis pangan telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Untuk mengantisipasi krisis pangan, salah satu strategi pemerintah adalah membuat program strategis 2020–2045 salah satu programnya membangun lumbung pangan (*food estate*) di Sumatra untuk komoditas hortikultura dan Kalimantan Tengah untuk komoditas padi dan singkong, melalui penerapan skema *public private partnership* (PPP) sehingga petani dan pemerintah dalam *food estate* ini tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan korporasi seperti BUMN dan swasta.⁹

Seiring dengan isu dalam skala global maupun nasional, serta berbagai kebijakan yang sudah diterapkan, masih dijumpai permasalahan kebutuhan pangan di Indonesia yang bersifat struktural dan multidimensional, meskipun secara agregat ketersediaan

8 Jakarta Food Security Summit - 5. *Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Ketahanan Pangan & Gizi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan & Industri Pengolahan*, materi acara KADIN Indonesia, 18–19 November 2020, dalam https://katadata.co.id/JFSS2020?utm_source, diakses pada 13 Juni 2020, 07.00 WIB.

9 Ghani Nurcahyadi. "Kemitraan Pemerintah-BUMN-Swasta Bisa Jamin Ketahanan Pangan." *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/362428/kemitraan-pemerintah-bumn-swasta-bisa-jamin-ketahanan-pangan>, diakses 12 Juni 2022, 08.30 WIB.

pangan nasional sering dinyatakan mencukupi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak dapat diukur semata-mata dari aspek produksi nasional, melainkan harus dilihat dari kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup, aman, dan bergizi secara berkelanjutan.¹⁰ Penelitian oleh Akbar, Darma, Fahmid, dan Irawan yang dipublikasikan dalam jurnal *Sustainability* menemukan bahwa sebagian besar rumah tangga di berbagai provinsi Indonesia mengalami ketidakamanan pangan pada masa pandemi Covid-19, dengan analisis regresi logistik mengindikasikan faktor-faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan pengeluaran makanan memiliki pengaruh signifikan terhadap status ketahanan pangan, sehingga peningkatan produksi pangan nasional belum otomatis meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat rentan.¹¹

Selain itu, penelitian yang sama mengungkap adanya kesenjangan antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan produksi pangan, khususnya produksi padi sebagai komoditas pangan utama. Ketidakseimbangan ini berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sistem pangan nasional, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, dan dalam jangka panjang dapat memperburuk kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Permasalahan kebutuhan pangan juga menunjukkan ketimpangan antarwilayah yang signifikan. Penelitian oleh Indri Arrafi Juliannisa, Hania Rahma, Sri Mulatsih, dan Akhmad Fauzi menunjukkan bahwa terdapat benturan signifikan dalam ketahanan pangan antarwilayah di Indonesia, di mana sejumlah provinsi memiliki tingkat kerentanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Temuan ini mengindikasikan bahwa capaian ketahanan pangan nasional bersifat agregatif dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di tingkat daerah, khususnya di wilayah yang lebih rentan dan kurang berkembang,

10 Achmad Suryana. *Ketahanan Pangan Nasional: Konsep, Dinamika, dan Kebijakan*. Balitbangtan: Kementerian Pertanian RI, 2014, hlm. 125-127.

11 Akbar Akbar, dkk. "Determinants of Household Food Security during the COVID-19 Pandemic in Indonesia." *Sustainability*, 15(5), 2023, hlm. 6-8.

di mana ketersediaan pangan menjadi faktor dominan dalam kerentanan pangan regional.¹²

Ketimpangan kebutuhan pangan makin terlihat dalam analisis spasial nasional. Penelitian dalam *Indonesian Journal of Geography* mengidentifikasi adanya kluster wilayah dengan ketahanan pangan rendah (*low-low cluster*) yang terkonsentrasi di kawasan Indonesia bagian timur. Rendahnya ketahanan pangan di wilayah tersebut berkaitan erat dengan keterisolasian geografis, keterbatasan infrastruktur, serta lemahnya kapasitas ekonomi daerah, yang pada akhirnya membatasi akses masyarakat terhadap pangan.¹³

Kerentanan kebutuhan pangan juga makin meningkat ketika terjadi guncangan eksternal. Studi Larasati menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan tekanan serius terhadap seluruh subsistem ketahanan pangan di Indonesia, terutama pada aspek ketersediaan dan akses pangan. Gangguan distribusi, penurunan pendapatan rumah tangga, serta meningkatnya harga pangan memperlihatkan bahwa sistem pangan nasional belum sepenuhnya tangguh dalam menghadapi krisis sosial-ekonomi berskala besar. Secara keseluruhan, berbagai temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kebutuhan pangan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan produksi dan ketersediaan, tetapi juga mencakup akses ekonomi, disparitas wilayah, stabilitas harga, serta ketahanan sistem pangan terhadap krisis.¹⁴

Sementara itu, penulis melihat bahwa keilmuan geografi memiliki pendekatan keruangan (spasial), ekologis (lingkungan), dan regional kompleks dalam mengkaji pembangunan berkelanjutan untuk ketahanan pangan. Dalam sebuah artikel yang berjudul "Geografi dalam Perspektif Filsafat Ilmu" pada jurnal *Majalah Geografi Indonesia* dijelaskan bahwa geografi merupakan bidang ilmu yang integratif antara aspek fisik dan sosial. Dalam mengkaji fenomena geosfer tidak boleh hanya menyentuh aspek fisik saja, harus komprehensif meliputi aspek fisik dan sosial (manusia). Sebagaimana

12 Indri Arrafi Juliannisa, dkk. "Regional Vulnerability to Food Insecurity: The Case of Indonesia." *Sustainability*, 17(11), 2025, hlm. 6–9.

13 Rusli Abdulah. "Mapping Food Security in Indonesia: Geographic Clusters and Regional Disparities." *Indonesian Journal of Geography*, 56(1), 2024, hlm. 89–92.

14 Yuniar Widya Larasati. "Food Security Policy in Indonesia during the COVID-19 Pandemic." *Critical Review of Sustainable Futures*, 4(1), 2024, hlm. 101–103.

definisi geografi yang berkembang saat ini, Hagget menyatakan “*geography is an integrative discipline that brings together the physical and human dimensions of the world in the study of people, place, and environments.*” Serta para ahli geografi Indonesia merumuskan definisi tentang geografi dalam seminar dan lokakarya di Semarang tahun 1988, berpendapat bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan.¹⁵

Pendekatan keruangan dalam bidang geografi digunakan dalam mengkaji ketahanan pangan dengan menganalisis gejala-gejala atau fenomena geografis yang memengaruhi ketahanan pangan berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Pendekatan keruangan titik berat pada aspek terkait ruang, berfokus kepada analisis sintesis tentang variasi perbedaan lokasi di permukaan bumi dan faktor-faktor dominan yang memengaruhi perbedaan tersebut.¹⁶

Adapun ruang merupakan keseluruhan ataupun sebagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat hidup tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Kondisi ruang itu kemudian dikaji dari segi perbedaan lokasi, sifat, struktur, pola, serta proses perkembangannya. Saat menggunakan pendekatan keruangan, ahli geografi akan berusaha mencari faktor-faktor yang menentukan pola penyebaran gejala alam. Tujuan memahami faktor-faktor itu adalah menemukan cara untuk mengubah pola sehingga bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan.¹⁷ Sebagai contoh pada kajian pengukuran ketahanan pangan masyarakat nelayan pascabencana Kota Palu dengan informasi penelitian sebagai berikut.¹⁸

Pertama, penelitian dikhususkan pada masyarakat nelayan Kelurahan Lere dan Kelurahan Panau dengan mempertimbangkan di

15 Furqan Ishak Aksa, dkk. “Geografi dalam Perspektif Filsafat Ilmu.” *Majalah Geografi Indonesia*, 33(1), 2019, hlm. 43-47.

16 Ine Kusuma Aryani. *Analisis Keruangan dan Sistem Sosial*. Jawa Tengah: SIP Publishing, hlm. 2-3.

17 Mwehe Mathenge, dkk. “Mapping the Spatial Dimension of Food Insecurity Using GIS-Based Indicators: A Case of Western Kenya.” *Food Security*, 15, 2023, hlm. 245-252.

18 Asdi Tambur. “Ketahanan Pangan Masyarakat Nelayan Pasca Bencana di Kota Palu.” *Jurnal MKG*, 22(2), 2021, hlm. 146-154.

kedua kelurahan tersebut, merupakan wilayah yang paling terdampak bencana, serta didukung populasi masyarakat nelayan cukup besar di kedua kelurahan tersebut, sehingga pendekatan geografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan keruangan yang mengkaji fenomena fisik maupun sosial atau keterkaitan antara keduanya pada ruang yang menjadi lokasi penelitian.

Kedua, metode yang digunakan adalah metode komparasi dengan cara membandingkan kondisi sosial ekonomi dan tingkat ketahanan pangan masyarakat nelayan pascabencana di Kelurahan Panau dan Kelurahan Lere. Ketiga, dengan hasil penelitian ketahanan pangan masyarakat nelayan di Kelurahan Panau berada pada kondisi tahan pangan yakni di Kelurahan Panau 66,67% dan di Kelurahan Lere yakni 63,16%. Diukur dengan menabulasi silangkan empat indikator penunjang ketahanan pangan yaitu kecukupan ketersediaan pangan bagi keluarga nelayan, stabilitas ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan bagi keluarga nelayan, dan terakhir adalah kualitas dan mutu pangan, didapatkan hasil tingkat ketahanan pangan masyarakat nelayan pascabencana di Kota Palu berada pada tingkat baik.

Selanjutnya fokus pendekatan ekologis pada kajian geografi yang menganalisis keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dalam penelitian pembangunan berkelanjutan untuk ketahanan pangan, dengan variabel lingkungan yang ada terletak pada interaksi antara manusia dengan lingkungan (alam) yang mencakup dua aspek, yakni perilaku organisme serta fenomena alam. Sisi perilaku manusia itu menyentuh unsur perkembangan gagasan dan kesadaran lingkungan. Pengamatan terhadap interelasi keduanya menjadi ciri khas pendekatan ekologis. Sebagai contoh kajian dengan menggunakan pendekatan ekologis, yaitu pada kajian "Kearifan Ekologi Orang Baduy dalam Konservasi Padi dengan 'Sistem Leuit'", dengan informasi penelitian sebagai berikut.¹⁹

Pertama, sejarah ekologi sebelum ada program modernisasi usaha tani sawah melalui program "Revolusi Hijau", para petani sawah di Jawa Barat dan Banten guyub menyimpan padi hasil panen padi di lumbung (*leuit*). Kini sistem lumbung padi tersebut hampir punah di

19 Johan Iskandar, dkk. "Kearifan Ekologi Orang Baduy dalam Konservasi Padi dengan 'Sistem Leuit.'" *Jurnal Biodjati*, 2(1), 2017, hlm. 155.

Jawa Barat dan Banten. Namun masyarakat Baduy yang bermukim di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten Selatan, kebiasaan menyimpan padi pada sistem *leuit* masih kokoh dipertahankan secara lekat budaya dan berkelanjutan.

Kedua, metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan etnoekologi, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa orang Baduy memiliki kearifan ekologi, seperti mampu menyimpan padi ladang hasil panen mereka pada lumbung padi (*leuit*) secara tahan lama dalam kurun waktu hingga puluhan tahun. Padi ladang utamanya hanya digunakan untuk memenuhi berbagai upacara adat dalam kegiatan berladang dan untuk dikonsumsi sehari-hari, terutama apabila orang Baduy tidak memiliki cukup uang untuk membeli beras sawah dari warung. Maka seyogianya kearifan ekologi orang Baduy ini dapat dipadukan dengan pengetahuan ilmiah Barat, guna dimanfaatkan dalam program pembangunan keamanan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

Selanjutnya dalam kajian dengan pendekatan regional kompleks geografi tertuju pada kajian komprehensif terhadap suatu wilayah, yang meliputi aspek fisik dan sosial (manusia), melalui analisis menitikberatkan pada areal *differentiation*. *Areal differentiation* yang dimaksud adalah adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah, yang mendorong suatu wilayah berinteraksi dengan wilayah lain. Proses yang dikenal sebagai “interaksi antarruang” itu terjadi seiring dengan adanya permintaan (kebutuhan) dan penawaran (ketersediaan). Sebagai contoh kajian ketahanan pangan dengan menggunakan pendekatan regional kompleks geografi yaitu pada penelitian “Mewujudkan Ketahanan Pangan Regional Melalui Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur”, dengan informasi penelitian sebagai berikut.²⁰

Pertama, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang ditetapkan pemerintah menjalankan kegiatan “Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)”. PUPM

20 Reyna Virginia Nona. “Mewujudkan Ketahanan Pangan Regional Melalui Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Disertasi*, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Denpasar: 2019.

bertujuan menjaga stabilitas harga, akses, dan ketersediaan pangan. Tujuannya untuk merumuskan model ketahanan pangan regional berdasarkan hubungan antara karakteristik wilayah produksi, konsumsi, dan kewirausahaan dengan kinerja PUPM di NTT. Kedua, ditunjukkan bahwa kinerja PUPM yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah produksi, konsumsi dan kewirausahaan baru tercapai pada taraf cukup di mana nilai $R^2 = 0,569$, sehingga belum sepenuhnya mampu mewujudkan ketahanan pangan regional. Kegiatan PUPM baru mampu memenuhi aspek akses dan stabilitas harga, sedangkan aspek ketersediaan hanya menyumbang sebesar 0,01% dari kebutuhan konsumsi beras di NTT tahun 2017. Ketiga, penelitian ini menyimpulkan bahwa model ketahanan pangan regional di NTT dapat diwujudkan melalui hubungan antara karakteristik wilayah produksi, konsumsi, dan kewirausahaan dengan kinerja PUPM. Saran bagi pemerintah provinsi dan kabupaten agar memberikan bantuan keuangan bagi kegiatan PUPM untuk memperluas usaha agar memperoleh keuntungan dan keberlanjutan usaha.

Dari uraian di atas, pembangunan berkelanjutan untuk ketahanan pangan adalah pembangunan yang berwawasan jangka panjang untuk terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Pembangunan berkelanjutan untuk ketahanan pangan juga berupaya menyediakan sumber daya yang cukup serta lingkungan yang sehat dalam mendukung kehidupan manusia, yang tecermin dari tersedianya pangan yang meliputi jangka waktu antargenerasi, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

Sementara itu, dari sudut pandang yang berbeda sebagian pakar memiliki pandangan bahwa pendekatan geografi dalam kebijakan ketahanan pangan kerap mereduksi persoalan ketahanan pangan menjadi sekadar isu spasial-fisik, seperti sebaran lahan pertanian, jarak distribusi, atau zonasi produksi pangan. Pendekatan ini cenderung memosisikan ruang sebagai variabel deterministik, sehingga mengabaikan relasi sosial, politik, dan ekonomi yang membentuk akses pangan di tingkat rumah tangga. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa wilayah dengan surplus produksi pangan tidak selalu memiliki tingkat ketahanan pangan yang tinggi, karena akses